

SKRIPSI

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM PENERTIBAN USAHA TAMBANG TIMAH
TIDAK BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**



Oleh:

DEVI SAPITRI

1900024172

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

THESIS

**THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE BANGKA
BELITUNG ISLANDS PROVINCE IN ILLEGAL TIN MINING BUSINESS
CONTROL BASED ON BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE**



Written by:

DEVI SAPITRI

1900024172

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

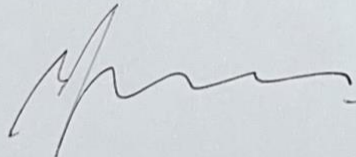
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM PENERTIBAN USAHA TAMBANG TIMAH
TIDAK BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing



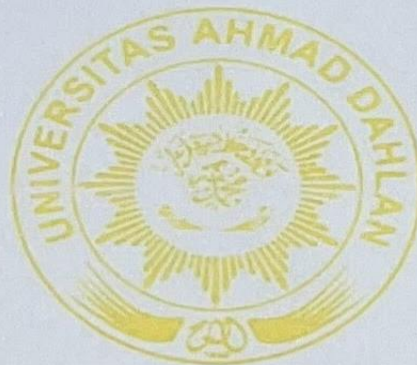
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

NIPM: 197905212004091110885094

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE BANGKA
BELITUNG ISLANDS PROVINCE IN ILLEGAL TIN MINING BUSINESS
CONTROL BASED ON BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurul Satria Abdi", written over a light blue background.

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

NIPM: 197905212004091110885094

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

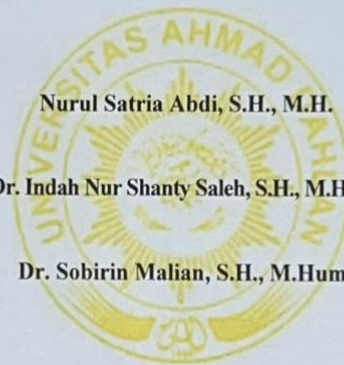
Pada Tanggal: 5 Desember 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji II : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 195806072023090100584069

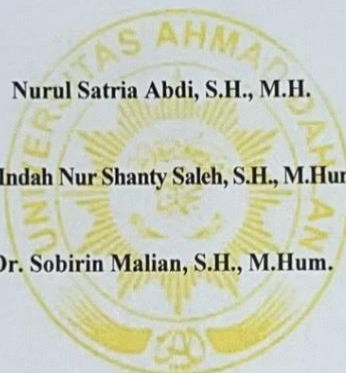
APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the Date: 5 December 2023

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.
Examiner I : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.
Examiner II : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



[Handwritten signature]
Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 195806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Sapitri
NIM : 1900024172
Email : devi1900024172@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program : Ilmu Hukum
Studi
Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Skripsi Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 5 Desember 2023



METERAI
TEMPEL
E5C5DALX040129798
Devi Sapitri

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Sapitri
NIM : 1900024172
Email : devi1900024172@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program : Ilmu Hukum
Studi
Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Skripsi : Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

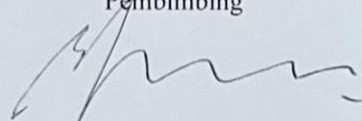
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Devi Sapitri

Mengetahui,

Pembimbing



Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

NIPM: 197905212004091110885094

HALAMAN MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar”

(Q.S Ali-‘Imran: 146)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bangi-Nya atas rahmat dan karunia-Nya. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Ibu Lena Siswati dan Bapak Batara. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, kasih sayang, semua doa, motivasi, dukungan semangat dan nasehat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Semua yang diberikan kepada penulis sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.
2. Kepada kedua adik saya Debi Sintia dan Dias Pangestu, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya baik itu dari keluarga Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
4. Universitas Ahmad Dahlan, sebagai lembaga studi penulis dalam meraih gelar sarjana hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adapun judul skripsi yang penulis tulis adalah yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas motivasi ilmu serta inspiratif dan penuh dedikasi sehingga penulis tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala motivasi dan ilmu sehingga Penulis dapat dengan tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan ilmu, motivasi dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala bentuk ilmu dan dukungan yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan atas motivasi ilmu dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid Alwaji, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memerikan motivasi dan arahan-arahan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Seluruh karyawan staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Batara dan Ibu Lena Siswati, dan ke dua adik-adik penulis Dias Pangestu dan Debi Sintia yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Muhammad Hefzan Dwi Sutra, S.Tr.K yang selalu memberi motivasi, dukungan serta semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masyarakat, karena telah berkenan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan.
12. Rekan-rekan serta sahabat seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2019 yang selalu saling menguatkan, mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diterima dengan lapang dada demi kebaikan tulisan ini. Harapannya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Konseptual	22
1. Batasan Istilah	22
2. Kerangka Teori	31

BAB III PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENERTIBAN USAHA TAMBANG TIMAH TIDAK BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	36
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
B. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	40
C. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	76

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM PENERTIBAN USAHA TAMBANG TIMAH
TIDAK BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Devi Sapitri

ABSTRAK

Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, peranan Satpol PP sangat penting dalam penertiban tambang timah tidak berizin yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat namun masih banyak tambang timah tidak berizin yang melakukan penambangan dilokasi yang dilarang sehingga merusak fasilitas umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap pertambangan timah tidak berizin dan kendala Satpol PP dalam melakukan penertiban tambang timah tidak berizin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama berupa wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penertiban usaha tambang timah tidak berizin yang melanggar Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam perannya Satpol PP melakukan kegiatan terdiri dari membentuk satgas tambang timah ilegal Bangka Belitung, melakukan patroli dan razia terhadap tambang tambang timah berizin yang melanggar Perda serta mengganggu masyarakat dan merusak fasilitas umum dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan tugas penertiban tambang timah tidak berizin tersebut terdapat beberapa kendala yaitu kurang sumber daya manusia PPNS Satpol PP, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, kendala pelaku tambang timah tidak berizin menolak dilakukan penertiban.

Kata Kunci: *Satpol PP, Usaha Tambang Timah Tidak Berizin, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

**THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE BANGKA
BELITUNG ISLANDS PROVINCE IN ILLEGAL TIN MINING BUSINESS
CONTROL BASED ON BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE**

Devi Sapitri

ABSTRACT

Article 255 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mentions "The Civil Service Police Unit was formed to enforce regional and local regulations, realize public order and community peace, as well as provide community protection". The role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is essential in controlling illegal tin mining which disturbs public order and community peace, but there are still many illegal tin mines that carry out mining in prohibited locations, thereby damaging public facilities. This research aims to identify the role of the Civil Service Police Unit in controlling illegal tin mining and their obstacles while controlling illegal tin mining.

This empirical juridical research uses primary data as the main data in the form of interviews. Besides that, this research also uses secondary data as a supporting data source. The data were collected by conducting field studies through interviews and literature study which were analyzed qualitatively and described in a descriptive form.

The research results show that the role of the Civil Service Police Unit in the Bangka Belitung Islands Province in controlling illegal tin mining businesses violated Article 43 paragraph (1) letter a and letter b of the Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 17 of 2016 concerning Public Order and Community Peace. While doing their role, the Civil Service Police Unit carried out activities, consisting of forming task forces for Bangka Belitung illegal tin mining, carrying out patrols, and raids on illegal tin mining violating the regional regulation, disturbing the community, and damaging public facilities. The obstacles faced by the Civil Service Police Unit in the Bangka Belitung Islands Province in controlling illegal tin mining businesses were the lack of human resources from PPNS Satpol PP, the lack of coordination with other law enforcement apparatus, and the illegal tin mining actors refused to be controlled.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Illegal Tin Mining Businesses, Public Order and Community Pea*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	31/01/2024